

ANALISIS PEMERATAAN WILAYAH DAN IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN): STUDI GEOSTRATEGI NUSANTARA

Novia Pegi Martinahayu^{1*}, Yasinta Mutiara Salwa², Mutia Tsani Nur Latifah³,
Naomi Citra Dewanti⁴, Muhammad Rafif Adrindhany⁵, Afrian Lingga Pratama⁶,
Suryo Ediyono⁷

Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami,
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 57126

*Penulis Korespondensi: viaavee@student.uns.ac.id¹, yasintams@student.uns.ac.id²,
mutiatsani@student.uns.ac.id³, naomicitra18@student.uns.ac.id⁴, rapip_4drin@student.uns.ac.id⁵,
afrianlinggapratama@student.uns.ac.id⁶, ediyonosuryo@staff.uns.ac.id⁷

Abstract. *Geostrategy plays a crucial role in geoeconomics, which requires a country to formulate strategies to compete on the international stage while taking into account its land, sea, and air borders, as well as political factors. This study aims to analyze the role of geostrategy in shaping national resilience through regional and economic development, as well as to examine the implications of relocating the National Capital (IKN) from Jakarta to East Kalimantan from a geostrategic perspective. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach. Data were collected through a review of the literature, government regulations, and a synthesis of various previous studies. The results show that geostrategy serves as a vital instrument in designing equitable regional development and strengthening the national economic structure, which has long been skewed due to its Java-centric nature. Geostrategically, the relocation of the IKN to East Kalimantan shifts this paradigm toward an Indonesia-centric model, while simultaneously reducing the ecological and socioeconomic burdens on the city of Jakarta. Implications for national resilience include strengthening economic resilience through the creation of new growth centers in central Indonesia, as well as enhancing national defense and security resilience due to a new geographic location that is more geopolitically secure.*

Keywords: *Geostrategy; Relocation of the National Capital; Regional Development; National Economy; West Kalimantan.*

Abstrak. Geostrategi berperan penting dalam geoekonomi, yang melibatkan suatu negara harus merumuskan strategi untuk bersaing di kancah internasional dengan mempertimbangkan komponen perbatasan baik darat, laut, dan udara maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran geostrategi dalam membentuk ketahanan nasional melalui pembangunan wilayah dan ekonomi, serta mengkaji implikasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ditinjau dari perspektif geostrategi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelaan literatur, regulasi pemerintah, serta sintesis dari berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan geostrategi berfungsi sebagai instrumen vital dalam merancang pemerataan pembangunan wilayah dan memperkuat struktur ekonomi nasional yang selama ini timpang akibat sifat Jawa-sentris. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur secara geostrategis menggeser paradigma tersebut menjadi Indonesia-sentris, sekaligus mengurangi beban ekologis dan sosial-ekonomi kota Jakarta. Implikasi terhadap ketahanan nasional mencakup penguatan ketahanan ekonomi melalui

penciptaan pusat pertumbuhan baru di wilayah tengah Indonesia, serta peningkatan ketahanan aspek pertahanan dan keamanan nasional karena letak geografis baru yang lebih terlindung secara geopolitik.

Kata kunci: Geostrategi; Pemindahan Ibu Kota Negara; Pembangunan Wilayah; Ekonomi Nasional; Kalimantan Timur.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, saat ini pembangunan masih menghadapi tantangan, terutama ketimpangan antarwilayah. Sebagian besar aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Jika ketimpangan ini terus-menerus terjadi, dampak yang akan ditimbulkan yaitu adanya perbedaan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan juga akan menimbulkan perasaan yang tidak adil di rakyat Indonesia. Jika kondisi ini terus dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan (Azim et al., 2022).

Jakarta sebagai ibu kota negara selama lebih dari tujuh dekade telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Akan tetapi, konsentrasi aktivitas tersebut menimbulkan permasalahan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, keterbatasan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya beban infrastruktur perkotaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurut Trisnawati (2023), Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi negara, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi domestik dan internasional sehingga menghadapi berbagai kerentanan lingkungan, seperti banjir, penurunan muka tanah, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas.

Dalam konteks geostrategi, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur memiliki nilai strategis karena letaknya yang relatif berada di tengah wilayah Indonesia. Posisi tersebut dinilai mampu mendorong transformasi paradigma pembangunan dari yang selama ini berorientasi Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris. Salah satu tujuan utama pemindahan ibu kota adalah memperbaiki struktur ekonomi Indonesia melalui pengembangan wilayah baru yang memiliki potensi strategis untuk pertumbuhan nasional (Sriyono et al., 2024). Herdiana (2022) menyatakan pemindahan ibu kota merupakan instrumen kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Selain itu, Kalimantan Timur memiliki tingkat risiko bencana yang relatif lebih rendah dibandingkan Jakarta, ketersediaan lahan yang lebih luas, dan kedekatan dengan jalur perdagangan nasional serta internasional.

Secara empiris, ketimpangan pembangunan anatara Pulau Jawa dan wilayah lainnya menjadi salah satu alasan utama pemindahan ibu kota. Data yang dikaji oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah di luar Jawa belum berkembang secara optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang berdampak pada distribusi investasi, peluang kerja, dan kesejahteraan masyarakat (Herdiana, 2022).

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga menunjukkan adanya perubahan arah pembanguna dari yang sebelumnya berfokus pada Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris. Paradigma Jawa-sentris mengakibatkan sebagian besar aktivitas ekonomi dan pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain mengalami perkembangan yang lebih lambat. Oleh karena itu, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendorong perkembangan wilayah tengah dan timur Indonesia.

Selain mendukung pembangunan wilayah, pemindahan IKN juga berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan nasional. Dalam perspektif geostrategi, pembangunan IKN tidak hanya ditujukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan integrasi antarwilayah, pemerataan persebaran penduduk, penguatan konektivitas nasional, dan peningkatan kemampuan pertahanan negara. Namun demikian, Ginajar et al. (2024) mengingatkan posisi IKN perlu diimbangi dengan strategi pertahanan yang kuat karena letaknya berada di kawasan yang dipengaruhi dinamika keamanan Indo-Pasifik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pokok pembahasan, yaitu (1) geostrategi sebagai instrumen pemerataan wilayah melalui pergeseran paradigma pembangunan dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris; dan (2) implikasi pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dalam perspektif ketahanan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Geostrategi dan Paradigma Wawasan Nusantara

Secara etimologis, geostrategi merupakan gabungan dari kata geografi dan strategi. Konsep ini pertama kali berkembang di dunia Barat melalui pemikiran para teoretikus klasik seperti Alfred Thayer Mahan dengan teori kekuatan maritim (*Sea Power*), Halford Mackinder dengan teori daerah jantung (*Heartland Theory*), dan Nicholas J. Spykman dengan teori daerah lingkaran (*Rimland Theory*). Dalam lintasan sejarah hubungan internasional konvensional, geostrategi didefinisikan secara agresif, ofensif, dan militeristik (*outward-looking*). Geografi dipandang sebagai medan perang atau instrumen ekspansi untuk menguasai ruang hidup (*lebensraum*) demi memenangkan persaingan hegemonik antarbangsa (Suradinata, 2005).

Namun, Indonesia mengadopsi akar pemikiran geostrategi yang secara paradigmatis berbeda total dari doktrin Barat tersebut. Melalui penalaran deduktif yang dirumuskan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, geostrategi

Indonesia didefinisikan sebagai metode memanfaatkan seluruh konstelasi geografis negara kepulauan untuk menetapkan kebijakan, pembangunan, dan sarana pencapaian cita-cita proklamasi (Lemhannas RI, 2021). Sifatnya tidak lagi ofensif-ekspansif, melainkan defensif-aktif dan berorientasi ke dalam (*inward-looking*) untuk menjaga integrasi nasional dan kedaulatan wilayah.

Pondasi utama dari geostrategi Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Konsep ini menempatkan wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Menurut An Nafiah dan Slam (2024), Wawasan Nusantara bertindak sebagai cara pandang bangsa, sedangkan geostrategi bertindak sebagai metode pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks relokasi ibu kota, geostrategi berfungsi sebagai instrumen rekayasa keruangan makro (*spatial engineering*). Pusat pemerintahan baru tidak lagi sekadar dipandang sebagai titik koordinat administrasi, melainkan sebagai pusat gravitasi geopolitik yang berfungsi mendistribusikan kekuasaan, keadilan, dan kemakmuran secara proporsional ke seluruh penjuru tanah air. Pemindahan ini meruntuhkan bias determinisme geografis masa lalu yang mengunci pusat kendali negara di Pulau Jawa, dan menggantinya dengan pemetaan ruang hidup yang adaptif terhadap konstelasi global kontemporer.

B. Konsepsi Ketahanan Nasional dan Analisis Astagatra

Ketahanan nasional pada dasarnya merupakan konsepsi khas dan doktrin perjuangan bangsa Indonesia yang mendeskripsikan kondisi dinamik suatu bangsa (An Nafiah & Slam, 2024). Konsepsi ini mengintegrasikan seluruh lini kehidupan nasional secara terpadu, yang berisikan keuletan, ketangguhan, serta komitmen mendalam untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Dalam gatra alamiah, asimetri spasial seperti pemusatan populasi (gatra demografi) dan eksploitasi komoditas mentah di luar Jawa yang ditarik ke pusat (gatra kekayaan alam) secara langsung melemahkan Panca Gatra. Ketika ketimpangan ekonomi antardaerah terus melebar, gatra sosial-budaya akan rapuh akibat hilangnya rasa keadilan, yang pada gilirannya memicu konflik vertikal pada gatra politik.

C. Teori Pembangunan Wilayah dan Ketimpangan Spasial

Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa dapat

dipahami melalui beberapa teori ekonomi keruangan. Salah satunya adalah Teori Kausalitas Kumulatif (Circular Cumulative Causation) dari Gunnar Myrdal, yang menyatakan bahwa pembangunan cenderung berpusat di wilayah yang memiliki keuntungan awal (seperti pusat pemerintahan), sehingga menciptakan efek aglomerasi atau penumpukan modal (Nasruddin, 2013).

Dalam kasus Indonesia, Pulau Jawa telah lama menjadi pusat pertumbuhan yang menikmati mayoritas arus investasi, sementara luar Jawa mengalami dampak efek balik spasial yang merugikan (Maku et al., 2023). Untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan dan pembangunan regional ini, lazim digunakan indikator makro seperti Koefisien Gini dan Indeks Williamson. Secara konseptual, kedua indeks ini mengukur derajat ketidakmerataan ekonomi, di mana angka yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan yang semakin parah.

Guna mengatasi kebuntuan ini, Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory) dari Francois Perroux menawarkan solusi berupa intervensi sengaja oleh negara untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar wilayah dominan (Sriyono et al., 2024). Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah nyata pemerintah untuk menciptakan kutub pertumbuhan baru tersebut, dengan tujuan membalikkan efek balik spasial menjadi efek sebar kemakmuran ke kawasan tengah dan timur Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan dalam mencari dan menganalisis teori serta masalah yang terjadi di ruang publik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi serta menganalisis masalah yang terjadi di sekitar masyarakat secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaahan literatur terhadap berbagai bacaan termasuk dokumen regulasi dan kebijakan pemerintah serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Geostrategi dalam Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional pada dasarnya merupakan konsepsi khas dan doktrin perjuangan bangsa Indonesia yang mendeskripsikan kondisi dinamik suatu bangsa (An Nafiah & Slam, 2024). Konsepsi ini mengintegrasikan seluruh lini kehidupan nasional secara terpadu, yang berisikan keuletan, ketangguhan, serta komitmen mendalam untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Sifat ancaman tersebut dapat bermanifestasi secara langsung maupun tidak langsung, serta datang dari lingkungan internal domestik ataupun intervensi eksternal luar negeri yang berpotensi membahayakan integritas, kedaulatan, identitas, dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setyaningrum et al., 2021; An Nafiah & Slam, 2024).

Dalam pandangan falsafah negara, ketahanan nasional didirikan atas dasar pemahaman dan pelaksanaan yang seimbang antara pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach) secara serasi, selaras, dan seimbang di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diperlukan sebagai bagian mutlak dari pembangunan nasional karena berkontribusi langsung dalam memacu pertumbuhan ekonomi rakyat (Setyaningrum et al., 2021).

Sebaliknya, kegagalan pemerintah dalam mengelola kesejahteraan masyarakat, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran struktural, secara linear akan menurunkan derajat ketahanan nasional. Hal ini disebabkan oleh asumsi sosiologis bahwa kemiskinan dan pengangguran berkorelasi erat dengan peningkatan eskalasi kriminalitas dan kejahatan di dalam negeri. Jika angka kejahatan domestik meningkat, kedaulatan internal negara akan terancam dan memicu risiko instabilitas di gatra lainnya. Oleh karena itu, ketahanan nasional diperlukan sebagai penunjang utama keberhasilan peran dan tugas pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bersama yang berkeadilan (Setyaningrum et al., 2021).

Untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang stabil dan dinamis, diperlukan suatu instrumen atau metode pelaksanaan strategis yang disebut sebagai geostrategi (Setyaningrum et al., 2021). Secara umum, geostrategi didefinisikan sebagai perumusan strategi nasional yang memperhitungkan keadaan, kontur, dan konsentrasi geografis sebuah negara sebagai faktor utama dan paling mendasar. Melalui pendekatan ini, ruang geografis bukan lagi dipandang sebagai hambatan fisik semata, melainkan sebuah tantangan sekaligus sumber daya vital yang harus dioptimalkan untuk menentukan arah kebijakan politik dan jalannya pembangunan nasional (Setyaningrum et al., 2021; An Nafiah & Slam, 2024).

Terdapat perbedaan paradigmatis yang sangat mendasar antara akar pemikiran geostrategi tradisional global dengan hakikat geostrategi yang diadopsi oleh Indonesia. Berdasarkan lintasan sejarah hubungan internasional, teoretikus barat mendefinisikan geostrategi secara agresif-ofensif dengan fokus utama pada urusan militer dan strategi perang. Pemikiran barat memandang geostrategi sebagai subbidang geopolitik yang berorientasi murni keluar (external orientation), yang melibatkan kehadiran kekuatan bersenjata, proyeksi kekuatan ofensif, perencanaan serangan strategis, pengamanan aset tempur, serta pembentukan pangkalan militer luar negeri untuk menguasai ruang hidup (An Nafiah & Slam, 2024).

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI merumuskan geostrategi melalui penalaran deduktif dengan logika silogistik sebagai berikut.

1. Strategi pengelolaan kehidupan nasional dengan memanfaatkan kondisi geografis untuk mencapai tujuan nasional dinamakan geostrategi.
2. Ketahanan nasional merupakan strategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai tujuan nasional.
3. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah geostrategi itu sendiri.

Berdasarkan silogisme tersebut, geostrategi Indonesia diartikan sebagai metode memanfaatkan seluruh konstelasi geografis negara kepulauan untuk menetapkan kebijakan, arah pembangunan, dan sarana pencapaian cita-cita nasional berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial (Setyaningrum et al., 2021; An Nafiah & Slam, 2024). Dasar geostrategi Indonesia berpijak secara kokoh pada amanat Pembukaan UUD 1945, di mana Pancasila bertindak sebagai landasan peraturan dasar nasional (*staatsfundamentalnorn*) sekaligus sumber hukum utama negara (Setyaningrum et al., 2021).

B. Geostrategi sebagai Instrumen Pemerataan Wilayah dari Jawa Sentris menuju Indonesia Sentris

Geostrategi bukan sekadar konsep pertahanan militer, melainkan suatu kondisi geografis negara untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang adil dan kompetitif di kancah internasional. Selama berdekade-dekade, struktur ekonomi pembangunan infrastruktur Indonesia mengalami ketimpangan akibat paradigma yang bersifat Jawa-sentris. Peta perekonomian yang berpusat di Pulau Jawa tidak hanya memicu kesadaran penduduk, tetapi juga menciptakan kerentanan dalam aspek ketahanan nasional karena pertumbuhan tidak merata di perbatasan dan di luar Jawa (Suradinata, 2005).

Pulau Kalimantan, yang secara faktual bertindak sebagai salah satu wilayah penyedia utama bahan baku energi nasional, termasuk pasokan batu bara, minyak bumi, dan gas alam justru mengalami sirkulasi modal yang tidak adil. Sebagian besar pendapatan ekonomi yang diproduksi dan dihasilkan dari kekayaan alam di luar Pulau Jawa langsung ditarik ke pusat untuk membiayai pertumbuhan di Pulau Jawa (Maku et al., 2023; Nasruddin, 2013). Akibatnya, wilayah luar Jawa terancam mengalami stagnasi pembangunan ekonomi jangka panjang karena tidak didukung oleh kapasitas modal investasi yang berimbang (Silalahi, 2019 dalam Maku et al., 2023).

Dampak dari pemusatan aktivitas yang berlebihan ini tidak hanya memicu ketimpangan ekonomi, tetapi juga mendegradasi daya dukung lingkungan (*carrying*

capacity) Pulau Jawa secara ekstrem (Nasruddin, 2013). Konsentrasi industri yang masif di Jawa secara konstan telah menyusutkan lahan-lahan pertanian produktif. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya Pulau Jawa kehilangan lahan pertanian subur seluas 27 juta hektar (BPS, 2010 dalam Nasruddin, 2013). Degradasi lingkungan ini diperparah oleh kondisi DKI Jakarta sebagai pusat konvergensi bisnis dan pemerintahan (Maku et al., 2023). Jakarta kini berada dalam status over-populasi yang melampaui batas ekologisnya, ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan hidup yang parah, krisis ketersediaan air bersih jangka panjang, serta kemacetan lalu lintas kronis yang memicu kerugian ekonomi makro secara sia-sia hingga mencapai Rp 56 triliun per tahun (Silalahi, 2019 dalam Maku et al., 2023).

Geostrategi berfungsi sebagai instrumen untuk merancang tata ruang nasional dengan mempertimbangkan tiga komponen utama (Lemhannas RI, 2021):

- a) Komponen darat: membuka aksesibilitas wilayah pedalaman dan memperkuat konektivitas antar-pulau.
- b) Komponen laut dan udara: mengoptimalkan posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan global guna meningkatkan daya saing ekonomi internasional.
- c) Komponen politik: menegaskan kedaulatan negara di wilayah pelosok agar tidak terjadi disintegrasi atau pengklaiman wilayah oleh asing.

Dengan menggeser fokus pengembangan ke bagian tengah Indonesia, pemerintah sebenarnya sedang membangun pondasi ketahanan nasional yang lebih kokoh, di mana setiap wilayah memiliki kemandirian ekonomi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dinamika di Pulau Jawa.

C. Implikasi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Untuk membedah implikasi tersebut secara jernih dan komprehensif, sudut pandang analisis Astagatra yang mencakup Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial) menyediakan pisau analisis yang sangat tajam. Komponen-komponen ini saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun solidaritas publik di tengah kebhinekaan Indonesia (Akili et al., 2025).

- a) Rekonfigurasi Dimensi Tri Gatra (Geografi, Demografi, dan Sumber Kekayaan Alam)

Dalam aspek **Gatra Geografi**, pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menggeser status kerentanan spasial menjadi keunggulan strategis. Wilayah Kalimantan Timur memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang jauh lebih rendah serta

terletak tepat di tengah konstelasi kepulauan Nusantara. Implikasi geostrategisnya, posisi sentral ini memperpendek rentang kendali tata kelola pemerintahan ke seluruh pelosok tanah air, sehingga pelayanan publik dan koordinasi wilayah dapat berjalan secara lebih adil dan efisien (Ginajar et al., 2024). Visi besar Nusantara sebagai kota hutan pintar (*smart forest city*) juga menjadi tolok ukur baru bagi pengelolaan ruang yang ramah lingkungan.

Pada dimensi **Gatra Demografi**, pemindahan ini membawa implikasi besar terhadap peta penyebaran penduduk Indonesia yang selama ini sangat timpang. Kehadiran IKN sebagai *superhub* ekonomi dirancang untuk memicu arus migrasi terencana, menarik jutaan tenaga kerja terdidik, pelaku industri kreatif, dan aparatur sipil negara (ASN) ke wilayah tengah Indonesia (Akili et al., 2025). Implikasinya terhadap ketahanan nasional adalah terjadinya pemerataan kualitas sumber daya manusia secara spasial, sehingga wilayah Kalimantan dan sekitarnya mendapatkan suntikan energi demografis untuk menggerakkan roda pembangunan lokal secara lebih produktif.

Sementara itu, pada **Gatra Sumber Kekayaan Alam**, peralihan pusat negara ke Kalimantan Timur memaksa terjadinya perubahan paradigma pengelolaan komoditas. Kehadiran IKN mengimplikasikan adanya percepatan transisi energi bersih di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur penunjang IKN diwajibkan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) setempat, seperti energi surya dan hidro (Endarwati et al., 2024). Langkah ini memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

- b) Transformasi Dimensi Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan)

Pada dimensi **Gatra Ideologi dan Gatra Politik**, pemindahan IKN merupakan pengejawantahan langsung dari sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Secara politik, kebijakan ini mengimplikasikan adanya penguatan stabilitas tata kelola nasional melalui harmonisasi hubungan pusat dan daerah. Dengan mendekatkan pusat kekuasaan ke wilayah tengah Indonesia, saluran aspirasi politik daerah menjadi lebih pendek dan inklusif. Hal ini memperkecil peluang munculnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang lebih solid (Hidayat, 2025).

Dalam hal **Gatra Ekonomi**, implikasi pemindahan IKN bertindak sebagai katalisator pemecah sumbat pertumbuhan ekonomi. Kehadiran IKN di Kalimantan Timur menciptakan segitiga pertumbuhan ekonomi baru bersama Kota Balikpapan dan Samarinda (Wibowo, 2024). Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur menciptakan efek multipler

(*multiplier effect*) yang luas bagi wilayah sekitarnya. Kemandirian ekonomi regional yang tercipta dari rantai pasok baru ini akan memperkuat struktur ekonomi makro nasional, sehingga Indonesia memiliki daya tahan yang lebih tangguh saat menghadapi krisis.

Ditinjau dari **Gatra Sosial Budaya**, kehadiran kota metropolitan baru di tengah tanah Kalimantan membawa implikasi kultural yang menantang sekaligus berpotensi positif. Implikasi positifnya adalah terbentuknya identitas nasional baru yang kosmopolitan namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang orisinal (Lestari, 2024). Namun, negara wajib mengawal proses ini dengan memberikan ruang perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi yang kokoh bagi masyarakat adat setempat, seperti suku Dayak dan Paser.

Terakhir, pada dimensi **Gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam)**, pemindahan IKN menuntut perombakan total pada doktrin pertahanan negara. Letak geografis IKN yang berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menempatkan ibu kota baru ini di garis depan dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lemhannas RI (2024) mencatat bahwa implikasi pertahanan dari pemindahan ini adalah keharusan untuk membangun sistem pertahanan semesta berlapis secara terpadu (*smart defense*). Pusat komando militer yang baru didesain dengan konsep penangkalan (*deterrence strategy*) yang aktif demi menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa geostrategi Nusantara berfungsi sebagai instrumen vital dalam merancang pemerataan wilayah sekaligus merekonfigurasi arsitektur ketahanan nasional Indonesia. Upaya menggeser paradigma dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur secara nyata mampu menjawab akar masalah ketimpangan pembangunan, kepadatan demografis, dan degradasi lingkungan akut yang selama ini mengunci Pulau Jawa. Ditinjau dari perspektif Astagatra, pemindahan pusat pemerintahan ini terbukti memberikan implikasi positif berupa dekonsentrasi spasial ekonomi, optimalisasi letak geografis yang memberikan kedalaman strategis (*strategic depth*) pertahanan di sepanjang ALKI II, serta menciptakan rekonsiliasi psikologis-politik yang memperkuat integritas sosiokultural antardaerah.

SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, sehingga data yang disintesis lebih banyak bersandar pada dokumen regulasi, proyeksi awal, dan kajian literatur terdahulu sebelum fase pemindahan secara masif rampung sepenuhnya. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Untuk penelitian yang akan datang, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi empiris kuantitatif yang melacak pergerakan riil Koefisien Gini dan Indeks Williamson pasca-relokasi fase pertama, serta melakukan penelitian lapangan jangka panjang mengenai dinamika asimilasi budaya antara masyarakat pendatang dan penduduk lokal di kawasan penyangga IKN.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2010). Lahan Indonesia. Jakarta: BPS.

Maku, S., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2023). Analisis Strategi Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Geopolitik Dan Geostrategi. *Iblam Law Review*. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.136>

Nasruddin. (2013). Pemindahan Ibukota RI ke Pulau Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI). Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XVI Ikatan Geograf Indonesia (IGI). <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/16972>

Setyaningrum, R. A., Trisiana, A., & Kirana, A. (2021). Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan Dalam Konsepsi Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4705>

Suradinata, E. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Herdiana, D. (2022). Pemindahan ibukota negara: Upaya pemerataan pembangunan ataupun mewujudkan tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1-30. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/265>

Sriyono, S., Rahmayani, A., & Wahidah, Z. (2024). Dampak Pengambilan Keputusan Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Aspek Geografi, Sosial Politik, Dan Ekonomi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 22-28. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15802](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15802)

Trisnawati, A. D. (2023). Penyusunan Scenario Planning Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). *Jurnal Paradigma*, 12(2). <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/13550>

Endarwati, M. C., Safa'at, R., & Wicaksono, A. D. (2024). Posisi Ibu Kota Nusantara dalam Konstelasi Geopolitik Asia Pasifik. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(3), 303–316. <https://doi.org/10.22146/jkn.99499>